

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN MELALUI PROGRAM PNPM
MANDIRI PEDESAAN
(Penelitian di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)

PENELITIAN INDIVIDUAL



Disusun Oleh:

ADON NASURULLAH JAMALUDIN, M.AG
SUNAN GUNUNG DJATI
NIP. 19720327 199703 1001

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYRAKAT
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2012**

A. DAFTAR ISI

B.		Halaman
DAFTAR ISI.....		i
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
	1.2. Rumusan Masalah.....	8
	1.3. Tujuan Penelitian.....	8
	1.4. Kegunaan Penelitian	9
	1.5. Kerangka Pemikiran.....	10
	1.6. Tinjauan Pustaka.....	15
BAB II	LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	2.1. Kondisi Obyektif Desa Kersamanah.....	17
	2.2. Gambaran Umum Gambaran umum Program PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut	18
	2.3. Efektivitas Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.....	24
	2.4. Faktor Penunjang dan Penghambat Program PNPM Mandiri Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut	30
	2.5. Usaha yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan	34

dari Program PNPM Terhadap Pemberdayaan
Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Desa Kersamanah
Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	37
B. Saran-Saran.....	40



C. KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Atas nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, penulis memanjatkan puji dan syukur tiada terhingga. Berkat rahmatnya penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian individual ini tepat pada waktunya.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu ucapan terima kasih penulis haturkan kepada: Bapak Kepala Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Garut beserta aparatnya, Petugas dan Pengelola PNPM Mandiri Perdesaan Desa Kersamanah dan lainnya.

Akhirnya kepada Allah Swt penulis berlindung dan memohon kepadanya semoga amal kebaikan mereka semua dibalas dengan pahala disisinya. Dan mudah-mudahan tulisan ini bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya. Amin ya robal alamin.

Penulis,

Adon Nasurullah Jamaludin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan merupakan suatu kenyataan sosial yang tak dapat dielakan oleh masyarakat. Di setiap daerah ada saja kategori masyarakat miskinnya. Ironisnya, kota saja yang sering kali dialamatkan sebagai masyarakat modern, maju, mapan dan serba mewah, tetapi dipinggir kota masih ada penduduk yang terbelakang. Mereka seolah termarginalisasi dengan keadaannya. Istilah “*kumis*” atau kumuh dan miskin lebih akrab untuk mengalami kemiskinan diperkotaan.¹

Persoalan kemiskinan selain dirasakan langsung oleh orang miskin sendiri, tetapi jika tidak segera diatasi akan berakibat buruk bagi kehidupan umat manusia. Sebab, dari masalah kemiskinan inilah akan mengakibatkan masalah lain seperti pengangguran, kelaparan, dan kebodohan dan lainnya. Sehingga untuk mengurangi masalah itu tidak sedikit masyarakat menyelesaikannya dengan cara yang bertolak dari norma yang berlaku, seperti menjadi pengemis, gelandangan, pengamen bahkan yang lebih ekstrim kadang dilakukan yakni dengan cara tindak kriminalitas.

Oleh karena itu masalah kemiskinan, hingga saat ini masih menjadi isu global. Artinya, kemiskinan tidak saja menjadi masalah pokok di Negara Dunia Ketiga, tetapi Ia juga masih menjadi persoalan di Negara industri maju. Hampir

¹ Istilah daerah kumuh lebih sering dialamatkan kepada penduduk kota dan setiap kota-kota besar ada saja memiliki daerah kumuhnya, lihat dalam Parsudi Suparlan, *Kemiskinan di Perkotaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 61.

disemua Negara berkembang, hanya sebagian penduduk saja yang dapat menikmati hasil pembangunan, sisanya mayoritas penduduk hidup melarat.

Strategi pembangunan yang ditetapkan tidak memberikan sumbangan yang banyak bagi kesejahteraan rakyat miskin. Sebaliknya, malah membuat mereka semakin sengsara. Sejalan dengan pemikiran itu, Korten² mengemukakan, selama tahun 1980-an terdapat tiga krisis global yang terpatri dalam kesadaran umat manusia. Krisis itu adalah kemiskinan, kegagalan lingkungan hidup, dan tindak kekerasan sosial.

Namun, jika kita perhatikan ternyata asal muasal dari dua krisis global tersebut bersumber dari kemiskinan. Meskipun telah banyak upaya penanganan kemiskinan yang dilakukan khususnya di Negara Dunia Ketiga, namun kemiskinan tetap saja merupakan masalah utama di negara dunia ketiga hingga saat ini.

Indonesia merupakan Negara Dunia Ketiga yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat. Kepadatan itupun rentan dengan permasalahan yang mengiringinya. Diantaranya adalah masalah kesejahteraan masyarakat yang tidak merata di Negeri ini. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya angka kemiskinan dari masa kemasa. Terlebih pasca krisis multidimensional yang berkepanjangan yang melanda bangsa Indonesia ini. Permasalahan kemiskinan di Indonesia saat ini sudah sangat mendesak untuk ditangani.

Lain halnya dengan masyarakat Desa, kemiskinan yang ada dimasyarakat perkotaan variabelnya lebih kompleks. Karena masyarakat perkotaan lebih

² David Korten, *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), h. 19.

mengarah pada mentalitas individualistik, persaingan yang tidak terpandu, yang besar kecenderungannya akan menambah dalam jurang pemisah antara kelompok yang berkemampuan dengan kelompok yang tidak berkemampuan. Maka akan muncul konflik yang terjadi akibat seleksi alam (*survival of the fittes*), yakni yang kuat akan tetap bertahan hidup, dan yang lemah akan tersisihkan, sehingga kelompok yang tidak berkemampuan akan kalah bersaing dan menjadi tenaga kerja dengan upah yang tidak sewajarnya. Indikator dari semua itu disebabkan karena kepadatan jumlah penduduk pendatang yang berbondong-bondong masuk ke kota lebih cepat dari kesanggupan industri untuk menampung tenaga kerja.

Ironisnya korban akibat dari persaingan tersebut adalah masyarakat lokal, sebab pemilik modal dikuasai oleh pihak asing yang dibantu oleh kebijakan-kebijakan pemerintah setempat dan para borjuis lokal yang mencoba merauk keuntungan dari tenaga kerja lokal tersebut seperti yang terjadi pada masa kolonialisme sebagai bukti historis.³

Kemiskinan merupakan suatu fenomena persoalan struktural dan multi dimensional, yang mencakup politik, sosial, ekonomi, aset, dan lain-lain. Dalam kehidupan sehari-hari dimensi-dimensi kemiskinan muncul dalam berbagai bentuknya, diantaranya adalah: (1) Dimensi politik yang sering muncul karena orang miskin tersebut tidak memiliki sarana untuk terlibat dalam proses politik yang mampu memperjuangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat miskin, sehingga mereka benar-benar tersingkir dari proses pengambilan keputusan

³ Arif Budiman, *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000), h. 66.

penting yang menyangkut diri mereka. (2) Dimensi sosial yang sering muncul dalam bentuk tidak terintegrasikannya warga miskin kedalam institusi sosial yang ada, serta terinternalisasikannya budaya kemiskinan, termasuk didalamnya pengikisan budaya kemiskinan yang sudah melekat pada mentalitas masyarakat Indonesia yang merusak kualitas manusia serta etos kerja mereka. (3) Dimensi lingkungan yang sering muncul dalam bentuk sikap, perilaku, dan cara pandang yang tidak berorientasi pada pembangunan berkelanjutan, sehingga cenderung memutuskan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang menjaga kelestarian dan perlindungan lingkungan serta pemukiman. (4) Dimensi ekonomi yang muncul dalam bentuk rendahnya penghasilan. Sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai batas yang layak, dan (5) Dimensi aset yang ditandai dengan rendahnya penghasilan masyarakat miskin keberbagai hal yang mampu menjadi modal hidup mereka, termasuk aset kualitas sumberdaya manusia (*human capital*) peralatan kerja, modal dana, perumahan dan pemukiman, dan lain sebagainya.⁴

Dari dimensi-dimensi diatas kemiskinan dapat digolongkan kedalam dua kategori, yaitu; (1) *Kemiskinan alamiah*, maksudnya kemiskinan yang disebabkan oleh kualitas dan kuantitas sumberdaya alam dan sumberdaya manusia. (2) *Kemiskinan struktural atau buatan*, yakni kemiskinan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh tatanan kelembagaan yang memihak kepada kepentingan pribadi atau golongan tertentu yang menyudutkan pihak lain.⁵

⁴ Sonny H. Kusuma, *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.17, No. 2, Juni 2002, Akatiga, Bandung, 2002, h. 178.

⁵ Wardi Bachtiar, *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kota Madya Bandung*, (Bandung: Disertasi Unpad, 1995), h. 14.

Orientasi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang hanya menitik beratkan pada salah satu dimensi dari gejala-gejala kemiskinan ini, pada dasarnya mencerminkan pendekatan program yang *parsial*, *sektoral*, dan tidak menyentuh akar penyebab kemiskinan itu sendiri. Akibatnya program-program yang dimaksud tidak mampu menumbuhkan kemandirian masyarakat serta mampu mewujudkan aspek keberlanjutan dari program-program penanggulangan kemiskinannya.

Sebenarnya upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia, terutama pasca krisis yang menyebabkan melonjaknya angka kemiskinan tersebut, bila kita amati terdapat pelajaran berharga dan mungkin sebagai penyadaran bagi para penyelenggara negara, bahwa kebijakan dalam melakukan pembangunan nasional pada umumnya, dan program penanganan kemiskinan pada khususnya yang menempatkan warga miskin sebagai objek pembangunan perlu dikoreksi. Artinya, bahwa dalam upaya penanganan kemiskinan perlu lebih melibatkan penduduk miskin sebagai subjek pembangunan, dan diharapkan penanganan kemiskinan nantinya dapat dilakukan sendiri oleh masyarakat.

Maka dari itu perlu adanya konsep pemberdayaan (*empowerment*) bagi masyarakat miskin. Konsep pemberdayaan merupakan strategi pembangunan yang digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Konsep ini dimulai sekitar 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an. Pada awal gerakan moderen, konsep pemberdayaan ini bertujuan untuk

menemukan alternatif-alternatif baru dalam pembangunan masyarakat yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia.⁶

Terkait dengan itu, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah perdesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat/kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.

⁶ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung: HUP, 2004), h. 1

Penanganan kemiskinan dengan melibatkan partisipasi pemerintah dan masyarakat yang menjadikan orang miskin sebagai subjek pembangunan dalam menanggulangi masalahnya merupakan hal yang belum banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga lain yang bergerak dalam bidang pemberdayaan. Hal inilah yang menarik perhatian dan minat penulis untuk memecahkannya melalui proses penelitian yang menitikberatkan pada partisipasi masyarakat dalam perubahan sosial ekonomi.

Walaupun telah banyak pakar yang meneliti masalah kemiskinan, namun objek penelitian sebagai sasarannya adalah penanggulangan kemiskinan dipedesaan melalui penguatan partisipasi masyarakat lokal terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat yang berlokasi di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut merupakan kajian yang belum pernah diteliti.

Desa Kersamanah Kabupaten Garut sangat tepat untuk dijadikan daerah penerima bantuan PNPM mandiri Pedesaan, karena salah satu ciri umum dari kondisi fisik masyarakat miskin yang ada di wilayah Desa Kersamanah adalah tidak memiliki akses prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, kelembagaan lokal, dan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh dibawah standar kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu, serta tidak dimilikinya keterampilan usaha bagi warganya.

Oleh karena itu setelah digulirkannya program PNPM Mandiri Pedesaan timbul pertanyaan apakah program ini efektif dilakukan dan diterima baik oleh masyarakat setempat untuk menanggulangi kemiskinan, serta berpengaruh terhadap perubahan ekonomi masyarakatnya atau tidak?

Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis mengadakan penelitian yang dirumuskan dengan judul: *Pemberdayaan Masyarakat Miskin Melalui Program PNPM Mandiri Pedesaan (Penelitian di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut)*

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan tersebut pada efektivitas program PNPM Mandiri sebagai salah satu model pemberdayaan masyarakat miskin dipedesaan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka perumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan program PNPM Mandiri Pedesaan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan khususnya di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut ?
2. Bagaimana efektivitas program PNPM Mandiri Pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut ?
3. Faktor apa yang menjadi kendala dan hambatan program PNPM Mandiri Pedesaan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Kersamanah Kecamatan Kabupaten Garut ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui program PNPM Mandiri Pedesaan yang digulirkan oleh pemerintah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan khususnya di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut ?
2. Untuk mengetahui efektivitas program PNPM Mandiri Pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut ?
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi kendala dan hambatan program PNPM Mandiri Pedesaan dalam pemulihan ekonomi masyarakat di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut ?

1.4.Kegunan Penelitian

Ada beberapa hal yang dianggap positif dan berguna baik secara akademis maupun secara praktis, yakni sebagai berikut:

4. Kegunaan akademis (teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan ilmu sosial ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan. Disamping itu, penelitian ini dapat dijadikan titik tolak untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam. Terutama tentang sejauh mana upaya pemerintah dalam membantu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi ganjalan bagi seluruh elemen masyarakat.

5. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk memberi penyadaran bagi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat akan pentingnya pengentasan kemiskinan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat miskin dalam menyelesaikan masalahnya, karena salah satu wujud kongkrit adanya penghargaan terhadap masyarakat miskin adalah dengan melibatkan mereka dalam pembangunan secara optimal.

1.5 Kerangka Pemikiran

Masalah kemiskinan merupakan masalah bersama, yang harus dicari pemecahannya secara bersama-sama pula. Oleh karena itu, Partisipasi masyarakat merupakan wujud dari fungsi masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan.

Menurut penganut aliran teori ketergantungan (*Dependensia*), kemiskinan muncul akibat adanya ketergantungan Negara-negara maju terhadap Negara-negara pinggiran. Hal itu disebabkan, karena kenaikan pendapatan nasional di negeri berkembang atau miskin adalah akibat dari adanya investasi asing yang tidak dinikmati oleh sebagian besar rakyat negeri miskin tersebut. Hal itu dikarenakan adanya kepincangan dalam distribusi pendapatannya.⁷

Teori ini dikemukakan oleh Andre Gunder Frank yang menjelaskan bahwa kemiskinan merupakan akibat dari ketergantungan Negara satelit (pinggiran) pada Negara maju atau yang Frank sebut dengan Negara metropolis diakibatkan oleh kaum borjuis di negara metropolis yang bekerjasama dengan pejabat pemerintah lokal di negara-negara berkembang atau miskin tersebut, selain itu di bantu oleh

⁷ Arif Budiman, *Op.Cit*, h. 66

kaum borjuis yang dominan disana (pedagang dan tuan tanah). Sebagai akibat dari kerjasama antara modal asing dengan pemerintahan lokal tersebut, lantas muncullah kebijakan-kebijakan pemerintah yang menguntungkan modal asing dan borjuis lokal, dengan cara mengorbankan kepentingan rakyat kecil.⁸

Akhirnya, pihak yang menikmati keuntungan pembangunan hanya dirasakan oleh segelintir orang saja, yakni para pemerintah lokal dan kaum borjuis lokal yang mereka peroleh dari hasil suatu proses eksploitasi, sedangkan rakyat banyak hanya korban dari eksploitasi tersebut. sehingga menimbulkan ketimpangan antara si kaya dan yang miskin.

Lebih lanjut Frank mengatakan, bahwa masuknya modal asing ke Negara miskin diiringi oleh masuknya sistem kapitalis, yang masuk dengan segala persoalannya, yang menyebabkan kegoncangan pada sistem ekonomi atau sosial yang terkandung didalamnya. Lebih jauh Frank memberikan Solusi dari permasalahan tersebut adalah *“putuskan hubungan dengan Negara-negara metropolis tersebut...”*.⁹ Dengan kata lain bahwa Negara-negara berkembang dan miskin harus lebih mandiri jangan selalu tergantung pada modal asing yang tidak kita sadari mengeksploitasi kita.

Sedangkan menurut pandangan penganut fungsionalisme kemiskinan timbul sebagai akibat dari tidak berfungsinya (disfungsional) salah satu elemen sistem sosial (sub-sistem) yang ada dalam masyarakat.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 67

⁹ *Ibid*, h. 64

¹⁰ Doyle Paule Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I dan II*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1990), h. 150.

Berdasarkan hubungan diatas Parson mengemukakan, bahwa ada empat fungsi primer yang terkenal dengan model A-G-I-L yang dapat dirangkaikan dengan seluruh sistem yang hidup untuk melihat efektifitas program terhadap perubahan sosial ekonomi berdasarkan partisipasi masyarakatnya, antara lain :

1. *Adaptation* menunjukan kepada keharusan suatu sistem sosial untuk menghadapi lingkungannya. *Pertama*, harus ada suatu penyesuaian dari sistem sosial terhadap tuntutan kenyataan yang tidak dapat diubah yang berasal dari lingkungannya. *Kedua*, ada proses transformasi aktif dari situasi itu. Dari penjelasan ini bahwa dalam menanggulangi kemiskinan PNPM mandiri harus melihat lingkungan yang dihadapinya serta mampu mengajak masyarakat untuk ikut bergabung dalam mengentaskan kemiskinan ini.
2. *Goal attainment* merupakan persyaratan fungsional, maksudnya bahwa suatu tindakan itu diarahkan kepada tujuan tertentu. Namun, titik perhatian yang utama bukan pada tujuan pribadi individu, tetapi pada tujuan bersama para anggota suatu sistem sosial. Dalam penelitian ini bahwa dalam melihat efektivitas program PNPM Mandiri, perlu kita lihat tujuan dari PNPM Mandiri untuk memberikan sarana dan prasarana dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan.
3. *Integration* merupakan persyaratan yang berhubungan dengan interelasi diantara anggota suatu sistem sosial. Agar sistem sosial itu berfungsi secara efektif sebagai satu kesatuan, maka harus ada suatu tingkat solidaritas di antara individu dalam sistem sosial tersebut. Dalam hal ini adalah solidaritas dari pengelola serta solidaritas dari partisipasi masyarakatnya dalam melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan lingkungannya.
4. *Latent Pattern Maintenance*. Konsep latensi menunjukan berhentinya interaksi. Maksudnya adalah bagaimana menjamin kesinambungan tindakan dalam sistem sesuai dengan beberapa aturan atau norma-norma.¹¹

Oleh karena itu pelaksanaan program pembangunan harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, organisasi pelaksana program, maupun perilaku aparat pelaksana program. Model ini berasumsi bahwa

¹¹ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 180

daya kerja dari suatu program pembangunan adalah fungsi kesesuaian antara mereka yang dibantu, program dan organisasi yang membantu.

Dengan istilah lain, program pembangunan akan gagal memajukan kesejahteraan suatu kelompok jika tidak ada hubungan yang erat antara kebutuhan-kebutuhan pihak penerima bantuan dengan hasil program, persyaratan program dengan kemampuan nyata dari organisasi pembantu, dan kemampuan pengungkapan kebutuhan oleh organisasi pembantu. Oleh karenanya agar program pembangunan dapat diterima oleh masyarakat, serta mampu meningkatkan akses terhadap program pembangunan. Makanya kesesuaian tiga arah itu harus diperhatikan.

Selain perilaku birokrasi, Partisipasi masyarakat miskin dalam program PNPM mandiri merupakan unsur yang paling penting dalam kelancaran program, karena masyarakat miskin sendirilah yang mengetahui masalahnya. Melalui upaya melibatkan masyarakat semenjak awal, maka diharapkan hal itu akan menumbuhkan suatu keadaan atau sikap dimana masyarakat merasa dihargai dan sekaligus juga merasa memiliki atas proses pembangunan yang sedang berlangsung.

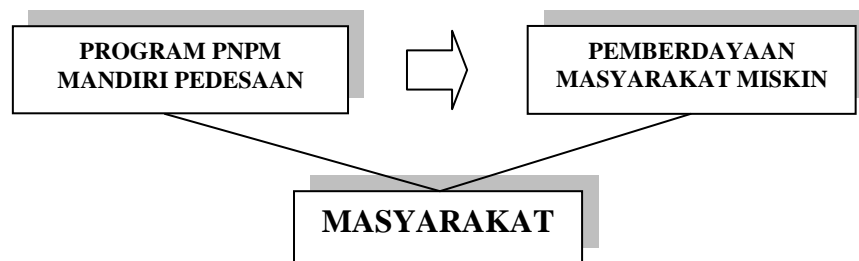
Oleh sebab itu, tidak kalah pentingnya dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan cara memperkuat kelembagaan dan solidaritas orang miskin agar bisa mengatasi persoalannya sendiri seperti yang dikatakan Durkheim bahwa unsur baku dalam masyarakat adalah faktor solidaritasnya. Dengan solidaritas yang tinggi inilah struktur sosial yang ada di masyarakat dapat menjadi sarana melakukan perubahan sosial ekonomi masyarakatnya.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam program PNPM Mandiri adalah dengan menggunakan unsur kelembagaan milik masyarakat. Penggunaan unsur kelembagaan milik masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan merupakan fenomena baru dalam strategi pembangunan di Indonesia. Keadaan ini juga mencerminkan semakin tidak populernya pendekatan sentralistis dalam pembangunan dan semakin pentingnya desentralisasi pembangunan.

Disamping perilaku birokrasi, partisipasi masyarakat dan penggunaan kelembagaan milik masyarakat, salah satu upaya untuk mengefektifkan suatu program adalah dengan cara komunikasi pembangunan atau sosialisasi program kepada kelompok sasaran atau para pelaksana program.

Melalui komunikasi, setiap tujuan program akan mudah diketahui dan dipahami oleh setiap orang yang memiliki kepentingan terhadap program tersebut. Demikian pula dengan program PNPM Mandiri, sebagai suatu program pembangunan pengentasan kemiskinan yang membutuhkan keterlibatan kelompok sasaran, maka komunikasi pembangunan antara pengelola program dengan kelompok masyarakat sasaran menjadi sangat penting dan merupakan kewajiban bagi pengelola program agar masyarakat mau terlibat dalam program tersebut.

Untuk memperjelas program PNPM Mandiri dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin di pedesaan, dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



1.6. Tinjauan Pustaka

Sejauh hemat penulis, penelitian terdahulu yang meneliti masalah kemiskinan sudah banyak dilakukan. Diantaranya:

1. Disertasi Wardi Bachtiar, yang berjudul: “Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kotamadya Bandung. Penelitian ini menyoroti tentang kawasan pemukiman kumis (kumuh dan miskin) yang ada diperkotaan khususnya di daerah Kodya Bandung, mengenai pengaruh etos kerja mereka terhadap kondisi sosial mereka.
2. Disertasi Paulus Israwan Setyoko, yang berjudul: “Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program IDT (Kajian tentang perilaku birokrasi, partisipasi masyarakat, kelembagaan dan komunikasi pembangunan dalam pelaksanaan INPRES Nomor 5 Tahun 1993 di Propinsi Jateng).
3. Skripsi mahasiswa Iva Fahmiawati, yang berjudul: “Efektifitas Program P2KP Terhadap Perubahan Sosial-Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Bandung”. Dalam penelitian ini didapat hasil bahwa program P2KP memiliki pengaruh yang cukup baik terhadap perubahan sosial ekonomi masyarakat setempat.

Penelitian-penelitian diatas, kebanyakan penanggulangan kemiskinan di daerah perkotaan. Penelitian penulis lebih mengarah kepada kemiskinan di pedesaan, khususnya program PNPM Mandiri yang digulirkan pemerintah dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Obyektif Desa Kersamanah

Desa Kersamanah termasuk wilayah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut. Desa ini sebagian besar berada dipegunungan, sebab wilayahnya dikelilingi gunung-gunung kecil disekitarnya. Masyarakat desa tersebut rata-rata tinggal dipedesaan, hanya sebagian kecil yang merantau ke perkotaan. Mereka hidup dalam kebersahajaan dengan mengandalkan sumber alam pedesaan yang ada.

Oleh karena itu, sebagian besar mata pencaharian mereka adalah bertani diperkebunan, dan sebagian bertani dipesawahan. Kegiatan petani, atau sebagai buruh tani sebagai mata pencaharian tetap, tetapi apabila pada musim kemarau datang, mereka ada yang bekerja sebagai penarik beca ke kota, berdagang serta buruh bangunan.. Serta lain-lainnya adalah mata pencaharian yang tidak tetap dan berubah-ubah.

Desa ini penduduknya sebagian daerah masih dalam kondisi sosial-ekonomi terbelakang. Indikator disebut daerah miskin adalah penduduknya yang serba sederhana, dengan kondisi pemukiman yang kurang layak dan tidak permanen. Kemudian sarana dan prasarana yang kurang memadai, lingkungan yang masih sederhana, juga letak rumah penduduk yang terpencil dan masih terbuat dari alam sekitarnya.

Kehidupan yang serba sederhana, dengan mata pencaharian seadanya tetapi mereka umumnya bisa bertahan hidup dari hari ke hari atau dengan kata lain

mereka mampu mencukupi kebutuhan pokoknya (*basic human needs*) sehari-harinya.

Disamping lingkungan serta mata pencaharian mereka yang rata-rata buruh tani atau sebagai petani, juga pendidikan merupakan factor yang menyebabkan terjadinya ketidak berdayaan mereka. Biasanya pendidikan selalu bersinergi dengan sosial-ekonomi serta mata pencaharian. Orang yang tidak berpendidikan secara otomatis rendah pula kualitas dirinya (tidak mempunyai skill). Maka pemilihan mata pencahariannya dengan mengandalkan tenaga atau otot, bukan otak. Rata-rata yang mata pencahahariannya seperti itu, sedikit penghasilannya. Mereka umumnya hidup dengan apa adanya, sesuai dengan kemampuan ototnya. Tidak tambah atau berkurang. Akhirnya social-ekonominya hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.

B. Gambaran umum Program PNPM Mandiri Pedesaan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Pedesaan di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.

Kondisi sosial masyarakat Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut memang belum bisa dikatakan baik. Bahkan bisa dikatakan masih dalam tahap berkembang. Karena, banyak masalah-masalah sosial kemasyarakatan yang sedang mereka hadapi. Terutama masih adanya masyarakat miskin dan tertinggal yang berada disekitar wilayah Desa Kersamanah tersebut.

Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau masyarakat Desa Kersamanah memerlukan sebuah lembaga sosial ekonomi untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang sedang mereka hadapi.

Salah satunya adalah lembaga sosial yang dibentuk pemerintah yaitu yang dikenal dengan PNPM Mandiri. Program ini merupakan langkah nyata bagi masyarakat Desa Kersamanah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab masyarakat bersama atau seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu semua pihak turut serta dalam program ini sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.

Oleh karena itu sebagai wujud kepedulian terhadap persoalan kemiskinan dan sebagai bentuk nyata dari upaya peningkatan kesejahteraan umum, maka seluruh warga Desa Kersamanah mengapresiasi program PNPM Mandiri yang ada di Desa tersebut, tentu tujuan utamanya adalah menanggulangi kemiskinan yang ada di Desa Kersamanah.

1. Pengertian dan Tujuan PNPM Mandiri Pedesaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan atau PNPM-Perdesaan atau Rural PNPM) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan mengadopsi sepenuhnya mekanisme dan prosedur Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang telah dilaksanakan sejak 1998. PNPM Mandiri sendiri dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Kota Palu, Sulawesi Tengah.

Program pemberdayaan masyarakat ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan masyarakat terbesar di tanah air. Dalam pelaksanaannya, program ini memusatkan kegiatan bagi masyarakat Indonesia paling miskin di wilayah pedesaan. Program ini menyediakan fasilitasi pemberdayaan masyarakat atau kelembagaan lokal, pendampingan, pelatihan, serta dana Bantuan Langsung untuk Masyarakat (BLM) kepada masyarakat secara langsung.

Dalam PNPM Mandiri Perdesaan, seluruh anggota masyarakat diajak terlibat dalam setiap tahapan kegiatan secara partisipatif, mulai dari proses perencanaan, pengambilan keputusan dalam penggunaan dan pengelolaan dana sesuai kebutuhan paling prioritas di desanya, sampai pada pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah binaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan dibawah koordinasi Bank Dunia.

Dengan demikian bahwa pengertian PNPM Mandiri adalah program nasional penanggulangan kemiskinan terutama yang berbasis pemberdayaan masyarakat. Pengertian yang terkandung mengenai PNPM Mandiri adalah :

1. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta

mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan.

2. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Program PNPM Mandiri ini adalah :

1. *Tujuan Umum*

- Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

2. *Tujuan Khusus*

- Meningkatnya partisipasi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat miskin, kelompok perempuan, komunitas adat terpencil dan kelompok masyarakat lainnya yang rentan dan sering terpinggirkan ke dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yang mengakar, representatif dan akuntabel.

- Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat terutama masyarakat miskin melalui kebijakan, program dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin (*pro-poor*)
- Meningkatnya sinergi masyarakat, pemerintah daerah, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi masyarakat dan kelompok perduli lainnya untuk mengefektifkan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan.
- Meningkatnya keberadaan dan kemandirian masyarakat serta kapasitas pemerintah daerah dan kelompok perduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.
- Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.
- Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan teknologi tepat guna, informasi dan komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Program dan Ruang Lingkup Kerja PNPM Mandiri

Adapun program serta ruang lingkup PNPM mandiri sebagai proses pemberdayaan masyarakat, dilakukan melalui komponen program sebagai berikut:

a. Pengembangan Masyarakat

Komponen Pengembangan Masyarakat mencakup serangkaian kegiatan untuk membangun kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat yang terdiri dari

pemetaan potensi, masalah dan kebutuhan masyarakat, perencanaan partisipatif, pengorganisasian, pemanfaatan sumberdaya, pemantauan dan pemeliharaan hasil-hasil yang telah dicapai. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan dana pendukung kegiatan pembelajaran masyarakat, pengembangan relawan dan operasional pendampingan masyarakat; dan fasilitator, pengembangan kapasitas, mediasi dan advokasi. Peran fasilitator terutama pada saat awal pemberdayaan, sedangkan relawan masyarakat adalah yang utama sebagai motor penggerak masyarakat di wilayahnya.

b. Bantuan Langsung Masyarakat

Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah dana stimulan keswadayaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat untuk membiayai sebagian kegiatan yang direncanakan oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan terutama masyarakat miskin.

c. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal

Komponen Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal adalah serangkaian kegiatan yang meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan pelaku lokal/kelompok perduli lainnya agar mampu menciptakan kondisi yang kondusif dan sinergi yang positif bagi masyarakat terutama kelompok miskin dalam menyelenggarakan hidupnya secara layak. Kegiatan terkait dalam komponen ini diantaranya seminar, pelatihan, lokakarya, kunjungan lapangan yang dilakukan secara selektif dan sebagainya.

d. Bantuan Pengelolaan dan Pengembangan Program

Komponen ini meliputi kegiatan-kegiatan untuk mendukung pemerintah

dan berbagai kelompok peduli lainnya dalam pengelolaan kegiatan seperti penyediaan konsultan manajemen, pengendalian mutu, evaluasi dan pengembangan program.

Sedangkan ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan penanggulangan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati masyarakat, diantaranya meliputi :

1. Penyediaan dan perbaikan pasarana/sarana lingkungan permukiman, sosial dan ekonomi secara kegiatan padat karya.
2. Penyediaan sumberdaya keuangan melalui dana bergulir dan kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat miskin. Perhatian yang lebih besar diberikan bagi kaum perempuan untuk memanfaatkan dana bergulir ini.
3. Kegiatan terkait peningkatan kualitas sumberdaya manusia, terutama yang bertujuan mempercepat pencapaian target MDGs.
4. Peningkatan kapasitas masyarakat dan pemerintahan lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.

C. Efektivitas Program PNPM Mandiri Pedesaan dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

Sebagaimana telah disinggung dimuka, bahwa program PNPM Mandiri adalah program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah agar angka kemiskinan dan pengangguran di tingkat pedesaan dan perkotaan menurun. Pemerintah juga berupaya agar dengan disalurkan program PNPM ini supaya

masyarakat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Program PNPM Mandiri juga bukan hanya berkisar pada individu yang miskin tapi program PNPM ini juga menganggarkan untuk infrastruktur seperti jalan desa dan program fisik lainnya yang tujuannya agar akses masyarakat bisa lebih mudah dan dapat terjangkau dengan baik. Dimana program PNPM ini membuat individu masyarakat miskin agar ada kekuatan (power) dalam memberdayakan kehidupan mereka.

Program atau kegiatan PNPM Mandiri yang ada di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut secara umum tertuang dalam program yang dikembangkan oleh Desa Kersamanah. Akan tetapi untuk sampai ke tingkat dusun atau RT, Desa Kersamanah membentuk unit terkencil. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah penyaluran, koordinasi serta evaluasinya. Salah satu bagian yang mengelola program atau kegiatan itu adalah UPK (Unit Pengelola Kegiatan). UPK adalah gugus tugas atau unit pelaksana teknis dari setiap dusun, yang akan menjalankan pengelolaan seperti menginventarisir jumlah kemiskinan, sarana fisik dan lainnya yang berkaitan dengan potensi kemiskinan suatu daerah, sehingga kemudian akan ditetapkan cara penyaluran dananya serta merencanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dibuat oleh Desa sebagai pemegang dana PNPM mandiri. Tugas pokok dari UPK ini ini sebagaimana tertuang dalam rincian tugas di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut adalah sebagai berikut:

1. Mengelola Pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi warga miskin.

2. Mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan sarana dan prasarana lingkungan bagi warga miskin.
3. Mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan sosial.

Program Kerja PNPM Mandiri di Desa Kersamanah

Diantara program-program yang dikembangkan dan dilaksanakan dalam upaya pengentasan kemiskinan di Desa Kersamanah sangat banyak. Akan tetapi beberapa program telah disepakati oleh UPK dan pihak Desa Kersamanah dan dianggap program nyata sesuai kebutuhan masyarakat setempat, yaitu:

1. Penyediaan dan perbaikan pasarana dan sarana lingkungan permukiman dan ekonomi serta kegiatan padat karya

Pada program kerja ini telah dilakukan atau dicanangkan sebagai program tahunan dalam rangka penanggulangan kemiskinan dipedesaan di Desa Kersamanah meliputi kegiatan lingkungan dan fisik, kegiatan ekonomi, dan sosial yang dibagi kedalam tiga catur wulan. Untuk *catur wulan pertama* program PNPM Mandiri lebih menitik beratkan pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin, seperti peningkatan kualitas pemukiman bagi masyarakat miskin, jalan-jalan, selokan, dan pengadaan air bersih.

Selain itu juga menitik beratkan pada kegiatan dana pinjaman bergulir warga untuk usaha produktif, yakni berupa kredit tanpa jaminan dengan imbalan jasa 1,5 % perbulan yang dibagi kedalam beberapa KSPP (Kelompok Simpan Pinjam Perempuan), jumlah KSPP minimal 10 orang dan maksimal 15 orang. Dana pinjaman tersebut diberikan kepada khususnya kaum wanita sebagai pengelola dari usaha produktif. Ini dikhususkan karena kaum wanita dianggap

lebih hati-hati, dan lebih banyak dirumah. Misalnya membuka warung, usaha kerajinan dan lainnya. Bahkan di Desa Kersamanah, ada yang dikelola untuk membeli hewan ternak.

Sedangkan dalam bidang sosial program PNPM Mandiri di Desa Kersamanah melakukan program konsolidasi dengan warga sebagai media bagi warga miskin, apabila ada warga yang mendapat musibah, seperti salah seorang anggota keluarganya meninggal maka keluarga tersebut mendapat tunjangan dari sisa dana pinjaman bergulir. Bahkan PNPM juga mengadakan program untuk keluarga miskin yang mempunyai salah satu anggota keluarga yang sudah usia jompo (50 tahun keatas). Berdasarkan data dari UPK jumlah KK miskin jompo ada sekitar 281 orang. Sedangkan jumlah KK miskin jompo yang sudah mendapat santunan sosial dari bantuan langsung masyarakat (BLM) adalah 72 orang (penyaluran Bulan Juli 2009) (Data Kegiatan UPK PNPM Mandiri Desa Kersamanah).

Untuk *catur wulan kedua* program kegiatannya hampir sama, tetapi dalam program peningkatan kualitas pemukiman masyarakat miskin dan pengadaan air bersih sudah tidak dilakukan, karena sudah dilakukan pada program catur wulan I.

Sedangkan untuk catur wulan III hanya ada dua program yakni Program peningkatan ekonomi keluarga miskin dengan agenda kerjanya adalah pencairan dana pinjaman bergulir untuk usaha produktif bagi masyarakat miskin dan program penguatan masyarakat atau warga miskin, serta melakukan evaluasi tahunan dari seluruh program kerja. Sistem pelaporan ada yang berskala 1 bulan

sekali, ada yang tiap 3 bulan sekali, dan juga ada yang 1 tahun sekali.

2. *Peningkatan kegiatan pemberdayaan sosial pada masyarakat lokal melalui penyadaran kritis, pelatihan ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta penerapan tata pemerintahan yang baik.*

Program lain, disamping program diatas PNPM Mandiri Desa Kersamanah melakukan penggalangan kegiatan lembaga koperasi masyarakat (LKM), karena PNPM Mandiri berorientasi kedepan memberdayaan masyarakat yang miskin menjadi lebih mandiri. Program ini bertujuan untuk membantu masyarakat miskin untuk menyisihkan uangnya, agar jika ada hal yang mendesak untuk ditangani, mereka tidak kebingungan lagi untuk hutang ke tempat-tempat lain, karena mereka punya tabungan sendiri.

Untuk melakukan konsolidasi antara pengurus dan pengelola UPK serta sebagai ajang sosialisasi program kepada masyarakat, dilakukan pertemuan setiap 1 bulan sekali. Pada pertemuan tersebut, membahas berbagi macam persoalan dari tiap dusun dan RT tentang berbagai temuan dilapangan, kemudian masalah tersebut diidentifikasi dan dicarikan solusinya bersama dengan para pengurus dan pengelola, sampai pada keputusan bersama berdasarkan mufakat. Biasanya pada pertemuan tersebut juga dibahas tentang pencairan pinjaman dana bergulir kepada para KSPP dan menentukan KSPP yang termasuk berprestasi, karena membayar pinjaman tepat waktu. Selanjutnya para UPK bertugas mensosilaisasikan program kegiatan yang akan digulirkan pada program bulan selanjutnya kepada para KSPP yang ada di wilayahnya masing-masing.

Jika penulis dapat analisa bahwa bentuk program kerja yang ditawarkan oleh PNPM Mandiri di Desa Kersamanah secara konseptual melalui pendekatan

teori struktural fungsional seperti yang ada dalam kerangka pemikiran penelitian ini merupakan suatu “pengakuan” terhadap persoalan kemiskinan yang sekaligus “keberanian” dari pemerintah untuk melakukan reorientasi baru dalam kebijakan berperang melawan kemiskinan struktural yang ada.

Reorientasi itu tertuju dari cara pandang ekonomi bahwa kemiskinan seakan-akan hanya persoalan ‘pendapatan keluarga’ yang kemudian dijawab dengan berbagai ‘proyek bantuan modal’. Maka pendekatan ini harus dirubah dengan strategi dan model program yang tidak hanya memberikan sumbangan dana semata, tapi harus dilakukan secara berkelanjutan agar masyarakat lebih mandiri. Seperti halnya strategi dan model program yang ditawarkan oleh PNPM Mandiri dengan menggunakan Strategi dan model program pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan lokal yang “*pro poor*” dan “*good governance*”.

Prinsip *good governance* ini memiliki 2 misi, yakni; (1) Menciptakan dan memperluas arena demokrasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat; (2) Membangun kapabilitas komponen pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengelola maupun mendistribusikan barang-barang publik. Ini berarti bahwa pelakunya harus memiliki kompetensi dalam menyusun kebijakan dan membangun sinergisme antar pihak.

Prinsip inilah yang menjadi pilar dalam setiap pelaksanaan program PNPM Mandiri yang menggunakan konsep tridaya, yakni proses pemberdayaan masyarakat agar terbangun daya sosial sehingga tercipta masyarakat yang efektif, daya ekonomi sehingga tercipta masyarakat produktif dan daya pembangunan sehingga tercipta masyarakat pembangunan yang peduli lingkungan dengan

prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.

Menurut penulis bahwa dalam setiap strategi dan model program PNPM Mandiri ini masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam setiap program yang didasarkan pada 4 proses yakni proses perencanaan, pengesahan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Pada proses perencanaan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pembangunan ini, sehingga masyarakat mampu menyalurkan kebutuhannya, dalam proses pengesahan masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusannya, serta dalam proses pelaksanaan masyarakat mampu melaksanakan program tersebut sesuai dengan yang mereka butuhkan yang tercantum dalam perencanaan, serta dalam evaluasi program masyarakat miskin mampu untuk ikut serta mengevaluasi program PNPM tersebut, dalam forum musyawarah.

Dengan demikian masyarakat miskin dapat dilibatkan dan merasa diakui dalam proses pembangunan yang sedang berlangsung, tidak hanya sebagai objek penerima bantuan semata, namun juga subjek dari pengentasan kemiskinan dalam pemulihan ekonomi demi kesejahteraan kehidupannya.

D. Faktor Penunjang dan Penghambat Program PNPM Mandiri Dalam Pemulihan Ekonomi Masyarakat di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

Setiap pelaksanaan kegiatan didalamnya ada bentuk harapan dan tantangan. Atau dengan kata lain ada sejumlah faktor penunjang (harapan) kegiatan dan sejumlah faktor penghambat (tantangan). Faktor penunjang adalah segala hal yang menjadi pendorong, pemotivasi atau setiap sesuatu yang menjadi pelaksanaan lebih baik. Dengan melihat beberapa dari faktor penunjangnya, maka

kegiatan tersebut lebih mudah diberdayakan, difungsikan serta dioptimalkan agar berjalan secara efektif dan efisien sehingga dapat mencapai sasaran (tujuan) yang ingin dicapai. Begitupun dengan faktor penghambat, tidak berarti kegiatan menjadi terhenti, tidak berjalan bahkan gagal. Faktor penghambat adalah segala sesuatu hal yang menjadi penghalang atau menjadikan sesuatu kegiatan tidak berjalan efektif. Faktor ini biasanya segala bentuk kekurangan-kekurangan atau tidak adanya sarana yang mendukung, yang ada pada kegiatan tersebut. Akan tetapi dengan lebih memberdayakan factor pendukung (penunjang) yang ada maka akan meminimalisir dari kekurangan-kekurangan yang ada.

Oleh karena itu pada pelaksanaan kegiatan program PNPM Mandiri di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut ini dalam rangka usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah faktor penunjang serta faktor penghambat.

1. Faktor Penunjang (Pendukung)

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya mengenai beberapa program yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh PNPM Mandiri sangat baik. Hal ini terbukti dari banyaknya kelompok simpan pinjam perempuan (KSPP) yang terbantu dengan adanya dana pinjaman bergulir yang ada dalam program PNPM. Oleh karenanya hal ini menjadi pendorong untuk mengembangkan program ini lebih baik lagi.

Keberhasilan seperti hal diatas, tentu saja banyak faktor yang mendukungnya, diantaranya:

1. Peran serta atau dukungan pemerintah Desa Kersamanah yang sangat

proaktif untuk mensosialisasikan kegiatan ini, sehingga seluruh program ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kersamanah.

2. Para petugas atau pengurus PNPM Mandiri khususnya UPK (Unit Pengelola Kegiatan) masyarakat Sukajaya yang menjalin hubungan dengan masyarakat miskin secara intens dan baik sehingga keduanya berjalan secara harmonis antara elemen masyarakat.
3. Kedisiplinan, amanah serta kejujuran yang baik khususnya para pengelola, sehingga penyaluran dana bergulir program PNPM cukup lancar dan tepat waktu.
4. Program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kemampuan kelompok miskin, sehingga berbagai kegiatan terlaksana secara baik seperti pembangunan jalan-jalan dan selokan, pembangunan rumah bagi warga miskin, penyediaan air bersih dan lainnya.
5. Dukungan masyarakat yang sinergi, sehingga dapat memperlancar kegiatan ini secara keseluruhan.

2. Faktor Penghambat (tantangan)

Walaupun program ini telah banyak manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat miskin, akan tetapi program PNPM Mandiri terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut belum mencapai hasil yang maksimal, sebagaimana yang diharapkan. Sebab, setiap lembaga manapun selalu dihadapkan pada suatu kesulitan atau hambatan dalam pelaksanaannya.

Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam efektivitas program

PNPM Mandiri terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Kersamanah adalah sebagai berikut:

1. Adanya kesalah pahaman masyarakat yang menganggap dana pinjaman bergulir dari PNPM Mandiri diartikan sebagai dana hibah atau pemberian cuma-cuma dari pemerintah, sehingga para UPK kesulitan untuk menagih uang dana pinjaman bergulir tersebut kemasyarakat. Bahkan banyak para KSPP yang tidak mau membayar kembali pinjamannya.
2. Sedikitnya pengurus/pengelola PNPM Mandiri yang aktif, serta kinerja UPK yang kurang optimal, yang dikarenakan sudah usia tidak produktif kerja lagi.
3. Rendahnya kualitas sumber daya alam dan sumber daya manusia pada masyarakat Desa Sukajaya yang sudah terpengaruh pada modernitas dan globalisasi.

Menurut analisa penulis yang didapat dari hasil wawancara dengan pengurus dan pengelola PNPM Mandiri Desa Kersamanah dapat dinalisis bahwa yang menjadi hambatan adalah kesalahan para pengurus dan pengelola yang diakibatkan kesalahan pemahaman mereka tentang masalah sosialisasi. Walaupun indikator sosialisasi sudah baik sebagaimana dalam faktor penunjang, namun hanya sekedar penyebaran informasi semata, tapi transformasinya masih kurang.

Proses sosialisasi lebih banyak dipahami hanya sebatas penyebarluasan informasi proyek saja oleh para penyelenggaranya, bukan sebagai sesuatu proses internalisasi sosial adalah penyadaran masyarakat terhadap visi dan misi PNPM Mandiri dalam meningkatkan kapasitas keswadayaan masyarakat dalam

mengelola potensi yang ada untuk menanggulangi masalah yang dihadapinya secara mandiri dan berkelanjutan.

Dengan kata lain, tidak terjadi suatu tansformasi nilai dan norma PNPM mandiri secara lebih baik kepada para pelaku penyelenggara proyek ataupun kepada masyarakat luas.

Imbas langsung yang sering terjadi di PNPM Mandiri Desa Kersamanah pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh pemahaman konsep PNPM yang tidak utuh karena proses sosialisasinya yang lemah karena proses sosialisasi hanya sekedar penyebar luasan informasi saja, tanpa adanya tansformasi kepada masyarakat miskin di wilayah tersebut.

Ekses persoalan-persoalan yang sering terjadi antara lain adalah salah menafsirkan dana pinjaman dari PNPM sebagai pemberian cuma-cuma dari pemerintah yang akhirnya berimbas pada kesadaran masyarakat miskin untuk membayar pinjamannya tersebut. Maka dibutuhkan upaya-upaya dalam menghadapi hambatan dan kendala dalam kelancaran program PNPM.

E. Usaha yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan dari Program PNPM Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Masyarakat Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut

Beberapa faktor penghambat program PNPM terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Kersamanah merupakan masalah yang perlu segera dipecahkan, karena dengan adanya masalah tersebut akan menghambat efektivitas pembangunan masyarakat Desa Kersamanah dalam mengentaskan kemiskinan masyarakatnya.

Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mentransformasikan kembali kepada masyarakat tentang status dana pinjaman bergulir tersebut kepada masyarakat, bahwa dana ini bukan dana hibah melainkan dana bergulir yang nantinya akan digunakan kembali buat pinjaman masyarakat. Akan tetapi, solusi yang paling baik dalam penyelesaian sengketa diantara KSPP dan UPK adalah dengan cara musyawarah dan mufakat. Jika solusi tersebut gagal maka digunakan cara lain melalui arbitrase dan hukum, hal ini bisa dilakukan karena PNPM merupakan lembaga yang berbadan hukum yang diawasi dan melibatkan pihak kepolisian.
2. Meningkatkan etos kerja pengurus dan pengelola, dengan cara mengganti pengurus yang sudah tidak produktif dengan pengurus lain yang lebih muda dan lebih produktif, sebagai regenerasi dalam pembelajaran mengelola lembaga masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial ekonomi ini. Pengganti tersebut harus mempunyai kriteria dan berjiwa dapat dipercaya, ikhlas/kesukarelaan, kejujuran, keadilan, untuk diberikan tanggungjawab dalam proses pengentasan kemiskinan, demi meningkatkan masyarakat yang makmur dan sejahtera, lewat jalur program PNPM.
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang ada di Desa Kersamanah, dengan cara mencari dan mengklasifikasikan kebutuhan masyarakat Desa Kersamanah terutama menyangkut kebutuhan yang

secara objektif dan signifikan untuk segera diberikan pemenuhan dan solusi, serta mengarahkan dan menyalurkan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat dengan meningkatkan partisipasi mereka dalam tata kehidupan menuju masyarakat madani yang mampu memanfaatkan dinamika masyarakat untuk mendukung, menjaga dan menyalurkannya kepada pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya, sehingga tujuan bisa tercapai dan dapat menghasilkan taraf kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya.

Dari upaya-upaya yang dilakukan tersebut diatas dapat membantu masyarakat untuk merubah perekonomian masyarakatnya dan lebih meningkatkan efektivitas program PNPM Mandiri secara berkelanjutan yang berdasarkan nilai, asas, dan prinsip PNPM Mandiri yaitu bertumpu pada pembangunan manusia, yaitu setiap kegiatan diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia seutuhnya; dan demokratis, yaitu bahwa setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian-uraian diatas, penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Program PNPM Mandiri Pedesaan yang digulirkan oleh pemerintah merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah pedesaan. Diadakannya program PNPM mandiri di Desa Kersamanah adalah dilatar belakangi kondisi sosial masyarakat Desa Kersamanah, terutama berkaitan dengan adanya masyarakat miskin dan tertinggal yang berada disekitar wilayah Desa tersebut. Oleh karena itu, masyarakat Desa Kersamanah memerlukan sebuah lembaga sosial ekonomi untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah kemasyarakatan yang sedang mereka hadapi. Salah satunya adalah diadakannya Program PNPM Mandiri Pedesaan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Oleh karena itu program PNPM ini sebagai lembaga sosial ekonomi yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat yang berfungsi sebagai wadah aspirasi masyarakat dalam kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang berada disekitar wilayah Desa Kersamanah Kecamatan Kersamanah Kabupaten Garut.

2. Adapun efektivitas program atau kegiatan Program PNPM Mandiri secara umum tertuang dalam aturan umum PNPM Mandiri serta program Desa Kersamanah. Salah satu bagian yang mengelola program PNPM Mandiri adalah UPK atau Unit Pengelola Kegiatan. UPK adalah gugus tugas atau unit pelaksana teknis dari PNPM, yang akan menjalankan pengelolaan berbagai kegiatan sesuai dengan kebijakan-kebijakan strategis yang telah dibuat oleh PNPM Desa Sukajaya. Diantara tugas pokoknya adalah *Mengelola Pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan ekonomi warga miskin; Mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan sarana dan prasarana lingkungan bagi warga miskin; dan Mengelola pelaksanaan berbagai kegiatan pemberdayaan social*. Bentuk dari program PNPM Mandiri Desa Kersamanah meliputi kegiatan lingkungan/fisik, kegiatan ekonomi, dan kegiatan sosial. Kegiatan lingkungan/fisik diantaranya peningkatan kualitas sarana dan prasarana bagi masyarakat miskin, seperti peningkatan kualitas pemukiman bagi masyarakat miskin, jalan-jalan, selokan, dan pengadaan air bersih. Untuk kegiatan ekonomi diantaranya dana pinjaman bergulir warga untuk usaha produktif, khususnya dibagikan kepada kaum wanita dengan jasa 1,5 % perbulan. Sedangkan dalam bidang sosial program PNPM Mandiri melakukan program konsolidasi dengan warga sebagai media bagi warga miskin, apabila ada warga yang mendapat musibah, seperti salah seorang anggota keluarganya meninggal maka keluarga tersebut mendapat tunjangan dari sisa dana pinjaman bergulir. Kemudian menggalangkan kegiatan lembaga koperasi masyarakat (LKM), dengan tujuan untuk membantu masyarakat

miskin menyisihkan uangnya, agar jika ada hal yang mendesak untuk ditangani, mereka tidak kebingungan lagi untuk hutang ketempat-tempat lain, karena mereka punya tabungan sendiri.

3. Faktor Penunjang dan Penghambat Program PNPM Mandiri dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Desa Kersamanah, diantara faktor penunjang kegiatan ini yaitu peran serta atau dukungan pemerintah Desa Kersamanah yang sangat proaktif untuk mensosialisasikan kegiatan ini, sehingga seluruh program ini dapat diketahui oleh seluruh masyarakat Kersamanah; Kemudian para petugas atau pengurus PNPM yang menjalin hubungan dengan masyarakat miskin secara intens dan baik sehingga keduanya berjalan secara harmonis; Kemudian kedisiplinan, amanah serta kejujuran yang baik khususnya para pengelola, sehingga penyaluran dana bergulir program PNPM cukup lancar dan tepat waktu; Kemudian program yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan kemampuan kelompok miskin, sehingga berbagai kegiatan terlaksana secara baik seperti pembangunan jalan-jalan dan selokan, pembangunan rumah bagi warga miskin, penyediaan air bersih dan lainnya; dan terakhir adalah dukungan masyarakat yang sinergi, sehingga dapat memperlancar kegiatan ini secara keseluruhan. Adapun faktor penghambatnya adalah adanya kesalah pahaman masyarakat yang menganggap dana pinjaman bergulir dari PNPM diartikan sebagai dana hibah atau pemberian cuma-cuma dari pemerintah, sehingga para UPK kesulitan untuk menagih uang dana pinjaman bergulir tersebut kemasyarakat. Bahkan banyak para KSPP yang tidak mau membayar kembali pinjamannya.

B. Saran-Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan berdasarkan simpulan diatas adalah sebagai berikut :

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang sosial, terutama yang berkaitan dengan ilmu sosial ekonomi dalam mengentaskan kemiskinan. Disarankan pula kepada para *stakeholder* baik perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lainnya untuk menjadi pembantu bagi jaringan dalam membantu mengurangi angka kemiskinan yang menjadi ganjalan bagi seluruh elemen masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, seperti memberikan *Achivment Motivation Training* bagi masyarakat miskin tersebut.

Bagi para pengurus dan pengelola PNPM Mandiri di Desa Kersamanah diharapkan agar dapat meningkatkan etos kerja para pengurus dan pengelola serta mencari faktor lain yang dapat membawa pada perubahan masyarakat miskin yakni dalam perubahan tingkat ekonomi dan tingkat sosial mereka yang lebih baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

DAFTAR PUSTAKA

- Bachtiar, Wardi, *Pengaruh Etos Kerja Terhadap Status Sosial Ekonomi Muslim Sunda Pemukiman Daerah Kumuh di Kota Madya Bandung*. Bandung: Disertasi Unpad, 1995.
- Budiman, Arif. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2000.
- Hikmat, Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: HUP, 2004.
- Johnson, Doyle Paule. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern I dan II*. Jakarta: PT. Gramedia, 1990.
- Korten, David. *Menuju Abad 21, Tindakan Sukarela dan Agenda Global*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001.
- Kusuma, Sonny H. *Jurnal Analisis Sosial*, Vol.17, No. 2, Juni 2002, Akatiga, Bandung, 2002.
- Poloma, Margaret M. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Suparlan, Parsudi Suparlan. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992.







uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG